BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang melakukan penelitian langsung di lapangan (*field research*) adalah tipe penelitian hukum yang melihat hukum dari sudut pandang di luar ilmu hukum.⁷⁹ Penelitian ini dilakukan untuk menggali pemahaman yang mendalam terkait bagaimana penyelesaian hukum terhadap kasus nikah siri di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Banjar diterapkan dalam praktiknya, serta bagaimana perspektif kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Banjar terkait penyelesaian hukum nikah siri, yang dikaji dalam upaya menyelaraskan antara nilai syariah dan kepastian hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara yang digunakan dalam suatu penelitian untuk memperoleh, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

1. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat.⁸⁰ Dalam penelitian ini, pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk memahami hubungan

⁷⁹ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020), h. 50.

⁸⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019), h. 90.

antara hukum dan masyarakat, khususnya untuk melihat bagaimana norma hukum perkawinan diterapkan di masyarakat Kabupaten Banjar, bagaimana Kantor Urusan Agama mempraktikkan mekanisme penyelesaian hukum nikah siri, serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhi kebijakan dan tindakan Kantor Urusan Agama. Pendekatan ini membantu peneliti memahami kesenjangan antara aturan hukum dan praktik lapangan.

2. Pendekatan kasus (*case approach*). Pada pendekatan ini, peneliti melakukan metode penelitian hukum pengamatan langsung terhadap proses berlakunya hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu di masyarakat atau lembaga hukum tertentu yang menerapkan aturan hukum.⁸¹ Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji secara mendalam penyelesaian hukum terhadap praktik nikah siri di Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar. Melalui pendekatan ini, penulis menelaah berbagai bentuk penanganan dan kebijakan yang dilakukan oleh masing-masing Kantor Urusan Agama, termasuk analisis terhadap langkah-langkah seperti isbat nikah, *tajdid nikah*, serta tantangan regulatif dan administratif yang dihadapi dalam praktik. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk melihat secara langsung dinamika penyelesaian hukum di lapangan, serta bagaimana perspektif kepala Kantor Urusan Agama terhadap kasus tersebut jika ditinjau dari sudut pandang nilai syariah dan kepastian hukum.

⁸¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram, University Press, 2020), h. 123.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di enam Kantor Urusan Agama yang berada di wilayah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu KUA Kecamatan Martapura, KUA Kecamatan Gambut, KUA Kecamatan Karang Intan, KUA Kecamatan Astambul, KUA Kecamatan Mataraman, dan KUA Kecamatan Simpang Empat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa KUA di kecamatan-kecamatan tersebut memiliki tingkat keragaman kasus nikah siri yang relatif tinggi serta perbedaan pola penyelesaian yang dilakukan oleh masing-masing kepala KUA.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek yang diteliti dalam penelitian hukum empiris, yaitu perilaku hukum (*legal behavior*) yaitu perilaku nyata dari individu atau masyarakat yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku.⁸²

Subjek dalam penelitian ini adalah kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Mereka dipilih sebagai subjek karena memiliki kewenangan dan pengalaman langsung dalam menangani serta memutuskan langkah penyelesaian hukum terhadap kasus nikah siri di wilayah kerjanya, sehingga perspektif dan kebijakan yang mereka terapkan menjadi sumber informasi yang kredibel dan relevan untuk menganalisis praktik penyelesaian hukum sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.

⁸² Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 85.

Objek penelitian ini adalah mekanisme penyelesaian hukum nikah siri di Kabupaten Banjar serta perspektif kepala KUA terkait upaya penyalarsan antara nilai-nilai syariah dan kepastian hukum dalam penanganan kasus tersebut. Objek ini mencakup prosedur penyelesaian, dasar hukum yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

E. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yaitu:

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara mendalam dengan kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar, yang merupakan narasumber utama penelitian ini, serta dari hasil observasi terhadap praktik penyelesaian hukum nikah siri di lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan artikel yang relevan. Sumber ini digunakan untuk membangun kerangka konseptual, memperkuat landasan teori dan mendukung analisis temuan lapangan terkait penyelesaian hukum nikah siri.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan terkait, observasi terhadap aktivitas dan mekanisme kerja KUA dalam menangani kasus nikah siri, serta dokumentasi atas regulasi, data dan arsip pendukung. Teknik ini dipilih secara sistematis untuk memperoleh informasi yang akurat, relevan dan mendalam sesuai fokus kajian.

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan kepala KUA Kabupaten Banjar untuk memperoleh data primer mengenai mekanisme penyelesaian hukum terhadap nikah siri, kendala yang dihadapi, serta pandangan mereka mengenai efektivitas kebijakan yang ada.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung bagaimana proses administrasi dan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama serta bagaimana pihak Kantor Urusan Agama menangani kasus nikah siri dalam praktiknya.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan meneliti berbagai bahan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tentang sahnya perkawinan dan kewajiban pencatatan, Pasal 7 ayat (1) tentang batas usia perkawinan, dan Pasal 43 ayat (1) tentang status anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Pasal 7 ayat (1) tentang perubahan batas usia

perkawinan), serta Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan Bab II Pasal 2 tentang perkawinan menurut hukum Islam, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 7. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan: Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 dan Pasal 2 dan Bab V Pencatatan Isbat Nikah Pasal 37.

G. Tehnik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena hukum terkait nikah siri di Kabupaten Banjar berdasarkan perspektif kepala KUA. Adapun proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan diantaranya:

1. Reduksi data, yaitu menyaring dan mengelompokkan informasi dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian, khususnya mekanisme penyelesaian nikah siri dan perspektif kepala KUA dalam menyelaraskannya dengan nilai syariah dan kepastian hukum.
2. Penyajian data, yaitu menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk uraian naratif yang sistematis, meliputi gambaran praktik penyelesaian nikah siri, perspektif kepala KUA, serta regulasi yang berlaku.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu yaitu merumuskan temuan penelitian yang valid dengan cara memeriksa kembali konsistensi dan kesesuaian data terhadap fokus kajian.